



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN MALILI**

JL. Dr. Sam Ratulangi No. 7 Telp. (0474) 321 008
MALILI 92981

**KEPUTUSAN CAMAT MALILI
NOMOR : 07 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NO: 01 Tahun 2026 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS (PPTK)
PADA KANTOR KECAMATAN MALILI DAN KELURAHAN MALILI
TAHUN ANGGARAN 2026**

CAMAT MALILI,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Keputusan Camat Malili tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kantor Kecamatan Malili dan Kelurahan Malili Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 52);
10. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 1/F-04/I/ Tahun 2026 tentang Pelimpahan Sebagian kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT MALILI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA KANTOR KECAMATAN MALILI DAN KELURAHAN MALILI TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kantor Kecamatan Malili dan Kelurahan Malili Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Malili ini;

- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan rutin;
 2. Melaporkan perkembangan kegiatan rutin; dan
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan rutin, yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan Camat Malili ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Kecamatan Malili Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT** : Keputusan Camat Malili ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 18 FEBRUARI 2026



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT MALILI
 NOMOR : 07 TAHUN 2026
 TANGGAL : 18 Februari 2026

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 KANTOR KECAMATAN MALILI TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PPTK
1	Perunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 27.996.000	RAHMA DAMAYANTI, S.S.MM. PENATA TK/III.d NIP. 19840309 201101 2008
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 3.767.000	
			Koordinasi dan Penyusunan DKA-SKPD	Rp 4.435.552	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 13.164.850	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.299.265.983	HAYATI, SE. MM. PEMBINA / IV a NIP. 197412312008012019
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp 29.014.000	
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Rp 19.979.500	HAYATI, SE. MM. PEMBINA / IV a NIP. 197412312008012019
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penilaian dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 10.714.650	RAHMA DAMAYANTI, S.S.MM. PENATA TK/III.d NIP. 19840309 201101 2008
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 49.020.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 10.030.000	HAYATI, SE. MM. PEMBINA / IV a NIP. 197412312008012019
			Penyediaan Bahan Logistik	Rp 18.417.700	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fenyeediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 11.412.550	HAYATI, SE. MM. PEMBINA / IV a NIP. 197412312008012019
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 9.780.000				

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	105.000.000	HAYATI, SE. MM. PEMBINA / IV a NIP. 197412312008012019	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	228.991.500		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	77.130.400	HAYATI, SE. MM PEMBINA/IV a NIP. 197412312008012019	
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	17.709.900	HAYATI, SE. MM. PEMBINA / IV a NIP. 197412312008012019	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	91.571.912		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	17.500.000		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Rp	318.960.000	HAYATI, SE. MM. PEMBINA / IV a NIP. 197412312008012019	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	30.000.000		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp	17.250.000			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bnagunan Lainnya	Rp	56.430.000				
2	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Rp	14.519.400	RISNAWINATA, S.P PENATA TK/III.d NIP. 19840626 200902 2 009
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp	27.719.500	ARIANI ASAAD, S.S PENATA/ II.c NIP. 19720115 200901 2 004
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp	44.539.250	

4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instalasi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp	13.353.500	FITRIANI, A.Md. PENATA MUDA TK.1/II b NIP. 198202012010012034
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp	3.754.500	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp	3.561.500	
5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp	67.925.600	MUHAMMAD ISNAEN, S.H PENATA/II.c NIP. 197700327 200906 1 001
6	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Koordinasi Pelaksanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Rp	23.499.600	ARIANI ASAAD, S.S PENATA/II.c NIP. 19720115 200901 2 004
7				Rp	4.666.314.347	

